

PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA WEULUN MELALUI OPTIMALISASI PROFIL DESA

Belandina Liliana Long^{1*}, Ernestus Holivil², Syukur Muhaymin Adang Djaha³,
Mariayani Oktafiana Rene⁴, Theny I. B. K. Pah⁵, Delila A. N. Seran⁶,
Made N. D. Andayana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
belandina.long@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Pengelolaan data melalui Profil Desa masih menjadi tantangan bagi banyak pemerintah desa, termasuk Desa Weeulun, akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan minimnya keterampilan teknis. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam optimalisasi Profil Desa sebagai instrumen strategis perencanaan pembangunan, serta meningkatkan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah (*soft skill*) dan pengisian, analisis, dan pemanfaatan data (*hard skill*). Metode meliputi sosialisasi, ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik pengisian data dengan 20 peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test berisi 10 pertanyaan serta survei kepuasan berbasis Likert. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dasar 26%, keterampilan teknis 16%, kemampuan analisis 16%, dan pemanfaatan data 12%. Mayoritas peserta (66,6%) sangat puas. Kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas aparatur melalui peningkatan *soft skill* dan *hard skill* serta tata kelola desa berbasis data.

Kata kunci: Profil Desa; Pemerintah Desa; Kapasitas Aparatur; Tata Kelola Desa; Masyarakat Desa Weulun.

Abstract: Village data management through the Village Profile remains a challenge for many local governments, including Weeulun Village, due to limited staff capacity and inadequate technical skills. This community service aims to strengthen village government capacity in optimizing the Village Profile as a strategic tool for development planning while enhancing soft skills (communication, collaboration, problem-solving) and hard skills (data entry, analysis, and utilization). The methods included socialization, interactive lectures, group discussions, and data entry practice involving 20 participants. Evaluation was conducted through pre- and post-tests consisting of 10 questions each, and a Likert-scale satisfaction survey. Results showed improvements in basic understanding (26%), technical skills (16%), analytical ability (16%), and data utilization (12%). Most participants (66.6%) were highly satisfied. This activity successfully strengthened both soft and hard skills of village officials and promoted data-based, transparent, and participatory village governance.

Keywords: Village Profile, Village Government; Apparatus Capacity; Village Governance; Rural Community Weulun.



Article History:

Received: 20-09-2025
Revised : 24-10-2025
Accepted: 25-10-2025
Online : 01-12-2025



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan isu strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan global. Agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* menempatkan desa sebagai entitas vital yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif. Desa adalah ruang di mana berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, kelaparan, serta keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, terlihat nyata (Sari, 2024). Dalam aras ini, strategi pemberdayaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sangat penting. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah penguatan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kemandirian desa (Baunsele et al., 2023; Yarni et al., 2024; Yatminiwati et al., 2023).

Namun demikian, desa di negara berkembang masih menghadapi tantangan signifikan dalam tata kelola pembangunan, terutama terkait dengan pengelolaan data. Rendahnya literasi digital aparatur desa, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya dukungan pemerintah pusat menjadi faktor utama penghambat (Hartati et al., 2024; Rizal et al., 2022). Banyak desa belum memiliki sistem administrasi yang rapi sehingga kesulitan mengumpulkan data akurat dan tepat waktu (Mulyana, 2025). Situasi ini diperburuk dengan terbatasnya pelatihan mengenai tata kelola data yang berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa (Ra'is & Rini, 2024; Tampubolon, 2025).

Kapasitas pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan prinsip *good governance*. Desa dengan aparatur yang memiliki kapasitas tinggi mampu mengelola dana desa secara transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga (Faiz et al., 2021; Muhiran, 2025). Dalam konteks ini, pelatihan dan pemberdayaan aparatur desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian desa. Selain memperbaiki tata kelola lokal, peningkatan kapasitas juga berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Anita, 2025; Putri et al., 2024).

Desa Weulun, Kec. Wewiku, Kab. Malaka, Nusa Tenggara Timur sebagai mitra pengabdian menghadapi persoalan nyata terkait keterbatasan pengelolaan data desa. Pertama, kapasitas aparatur desa masih rendah dalam memperbarui dan memanfaatkan Profil Desa secara efektif. Kedua, Profil Desa yang ada belum digunakan optimal sebagai instrumen perencanaan pembangunan sehingga perencanaan desa cenderung administratif. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan validasi data masih minim sehingga informasi yang tersaji tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil (Arianto & Bakthiar, 2023; Haris et al., 2023; Yatminiwati et al., 2023). Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan Profil Desa,

yang tidak hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memperkuat kelembagaan desa dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kapasitas aparatur desa berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan desa. Ningrum & Kolopaking (2018) menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kapasitas kelembagaan yang baik juga menentukan sejauh mana desa dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan berkelanjutan (Rahman, 2023). Selain itu, penelitian lain menyoroti peran Profil Desa sebagai instrumen pemetaan potensi sosial-ekonomi yang mendukung penyusunan strategi pemberdayaan masyarakat (Nofiarsyah, 2019; I. F. Sari et al., 2022). Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola dan memanfaatkan Profil Desa secara optimal.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga menunjukkan masih adanya kesenjangan. Profil Desa seringkali hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, bukan instrumen strategis (Aji et al., 2022; Machfiroh, 2019). Kurangnya kompetensi aparatur desa dalam analisis data menyebabkan informasi yang terkumpul tidak termanfaatkan dengan baik (Setiawan et al., 2024). Selain itu, lemahnya kelembagaan desa berdampak negatif pada kualitas perencanaan pembangunan, seperti pengelolaan dana desa yang tidak optimal serta rendahnya partisipasi masyarakat (Ghassani et al., 2022; Rahmat & Hermana, 2020). Hal ini memperlihatkan perlunya intervensi berupa pelatihan berbasis kolaborasi yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membangun pemahaman mengenai pentingnya data dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Weulun bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui optimalisasi pengelolaan Profil Desa. Program ini secara khusus dirancang untuk meningkatkan dua jenis keterampilan utama dari mitra, yaitu *soft skill* dan *hard skill*. Penguatan *soft skill* difokuskan pada peningkatan kemampuan komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah dalam proses pengumpulan serta validasi data desa. Sementara itu, pengembangan *hard skill* diarahkan pada keterampilan teknis aparatur dalam pengisian format Profil Desa, analisis data sosial-ekonomi, dan pemanfaatan hasilnya untuk mendukung perencanaan berbasis bukti. Melalui peningkatan kedua aspek tersebut, program ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan Profil Desa sebagai instrumen utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung (Holivil et al., 2025). Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Weulun, sebuah desa yang terletak di wilayah pedesaan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dukungan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, serta kepala dusun. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang, terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimaksudkan agar proses optimalisasi Profil Desa tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga inklusif dengan memasukkan perspektif warga sebagai penerima manfaat utama pembangunan desa. Artinya, kegiatan pengabdian ini mencerminkan pendekatan kolaboratif antara akademisi dan komunitas lokal.

Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap penting. Tahap pertama adalah persiapan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Weulun untuk menentukan kebutuhan utama terkait pengelolaan Profil Desa. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan asesmen awal melalui wawancara singkat dan observasi terhadap kondisi dokumen Profil Desa yang sudah tersedia. Selain itu, tim juga menyiapkan materi pelatihan yang mencakup teori tentang tata kelola data, pemanfaatan Profil Desa dalam perencanaan pembangunan, serta modul praktis tentang teknik pendataan dan pengisian format. Persiapan logistik seperti perangkat laptop, proyektor, serta bahan ajar dalam bentuk cetak dan digital juga dilakukan untuk memastikan proses pelatihan berjalan lancar.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang mencakup sesi ceramah, diskusi, dan praktik. Ceramah interaktif dilakukan untuk menjelaskan urgensi Profil Desa dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam pengelolaan data, seperti kurangnya konsistensi dalam pencatatan, keterbatasan akses teknologi, dan minimnya pemahaman analisis data. Pada bagian praktik, peserta dilatih mengisi format Profil Desa menggunakan data riil yang dimiliki, sekaligus melakukan simulasi bagaimana data tersebut dapat dianalisis dan digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan desa.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut, yang dilakukan dengan dua cara, yaitu evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan pada akhir kegiatan melalui *post test* dengan 10 pertanyaan dan diskusi terbuka untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan serta keterampilan baru yang diperoleh. Evaluasi jangka panjang dilakukan melalui monitoring dan komunikasi

berkala dengan Pemerintah Desa Weulun untuk menilai penerapan hasil pelatihan dalam praktik pengelolaan Profil Desa. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian menawarkan pendampingan tambahan berupa konsultasi daring dan kunjungan lapangan apabila diperlukan. Dengan mekanisme ini, program pengabdian diharapkan mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan memperkuat kelembagaan desa dalam jangka panjang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan identifikasi kebutuhan mitra melalui wawancara singkat bersama Kepala Desa dan perangkat desa Weulun. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan Profil Desa masih bersifat administratif, hanya digunakan sebagai syarat administrasi, bukan instrumen perencanaan. Aparatur desa juga belum memahami pentingnya data valid dalam mendukung perencanaan pembangunan. Temuan ini menjadi dasar utama dalam merancang materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan mitra.

Berdasarkan hasil asesmen, tim pengabdian menyusun modul pelatihan yang mencakup tiga aspek utama: pemahaman konseptual mengenai Profil Desa, keterampilan teknis pengisian format data, dan analisis sederhana untuk pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Modul ini disusun dengan bahasa sederhana, contoh konkret, dan disertai simulasi kasus dari desa Weulun agar lebih mudah dipahami oleh peserta.

Selain modul pelatihan, persiapan juga mencakup penyediaan perangkat pendukung berupa laptop, proyektor, serta format Profil Desa dalam bentuk cetak dan digital. Hal ini bertujuan agar setiap peserta dapat belajar secara langsung melalui praktik. Ruang balai desa dipilih sebagai lokasi kegiatan karena representatif dan dekat dengan masyarakat. Semua perangkat diuji terlebih dahulu untuk memastikan kelancaran teknis selama pelatihan.

Koordinasi intensif dengan Kepala Desa dan perangkat dilakukan untuk menentukan jadwal kegiatan, peserta yang terlibat, serta teknis pelaksanaan. Disepakati bahwa pelatihan akan melibatkan 15 peserta, terdiri dari perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat. Koordinasi ini penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dan dapat mendukung kegiatan secara optimal.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Sesi Pemberian Materi Konseptual

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sesi ceramah interaktif tentang pentingnya Profil Desa sebagai instrumen pembangunan. Materi disampaikan dengan pendekatan sederhana, menekankan hubungan antara data desa dengan kebijakan pembangunan, seperti penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Peserta antusias dan banyak mengajukan pertanyaan seputar bagaimana data dapat digunakan

untuk memperjuangkan program pembangunan ke tingkat kabupaten, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Penyampaian Materi Konseptual terkait Profil Desa

Pada sesi kedua, tim memberikan penjelasan mengenai regulasi terbaru terkait pengelolaan data desa. Hal ini penting agar peserta memahami kewajiban hukum dalam memperbarui Profil Desa. Peserta menyadari bahwa data yang valid dapat menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.

b. Sesi Praktik Pengisian Profil Desa

Tahap kedua dari kegiatan pelatihan difokuskan pada praktik pengisian Profil Desa, yang diawali dengan diskusi kelompok. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok kecil untuk mengidentifikasi kendala utama dalam pengelolaan data desa. Kelompok pertama menyoroti kendala teknis berupa rendahnya keterampilan komputer. Kelompok kedua menekankan keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan data jarang diperbarui. Sementara itu, kelompok ketiga mengangkat isu rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan data.

Hasil diskusi kelompok kemudian dipresentasikan kembali dalam forum besar. Dari pemaparan tersebut, muncul sejumlah solusi, antara lain pentingnya pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan aparatur, perlunya koordinasi yang lebih baik antarperangkat desa, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah. Proses ini tidak hanya menghasilkan daftar solusi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kolektif karena setiap peserta dapat menyimak pengalaman kelompok lain.

Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik langsung pengisian Profil Desa. Peserta dilatih untuk mengisi format data kependudukan, sosial, ekonomi, dan potensi desa dengan menggunakan data riil yang tersedia. Tim pengabdian mendampingi secara intensif, memberikan arahan teknis sekaligus umpan balik ketika peserta menghadapi kesulitan. Dengan cara ini, peserta dapat

memahami prosedur pengisian data secara lebih konkret dan aplikatif, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Praktik Pengisian Data melalui Aplikasi

Selama praktik berlangsung, ditemukan bahwa sebagian besar peserta baru pertama kali menggunakan format digital untuk pengelolaan data. Hal ini sempat menimbulkan kebingungan, terutama bagi peserta yang kurang terbiasa menggunakan komputer. Namun, melalui pendampingan yang berkesinambungan, mereka berhasil menyelesaikan pengisian data sederhana. Hasil akhir dari sesi ini menunjukkan peningkatan keterampilan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan Profil Desa secara lebih efektif.

c. Sesi Simulasi Pemanfaatan Data

Langkah terakhir dalam pelaksanaan kegiatan adalah simulasi pemanfaatan Profil Desa. Pada tahap ini, peserta diajak untuk menganalisis data yang telah diisi sebelumnya dan menggunakannya untuk memetakan kebutuhan prioritas pembangunan desa. Misalnya, dari data kependudukan terungkap bahwa angka pengangguran usia produktif cukup tinggi, sehingga program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan menjadi agenda yang perlu diprioritaskan dalam rencana pembangunan.

Melalui simulasi ini, peserta belajar bahwa Profil Desa bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen penting yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Proses analisis bersama ini memperlihatkan bagaimana data dapat diubah menjadi informasi strategis untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) secara lebih terarah.

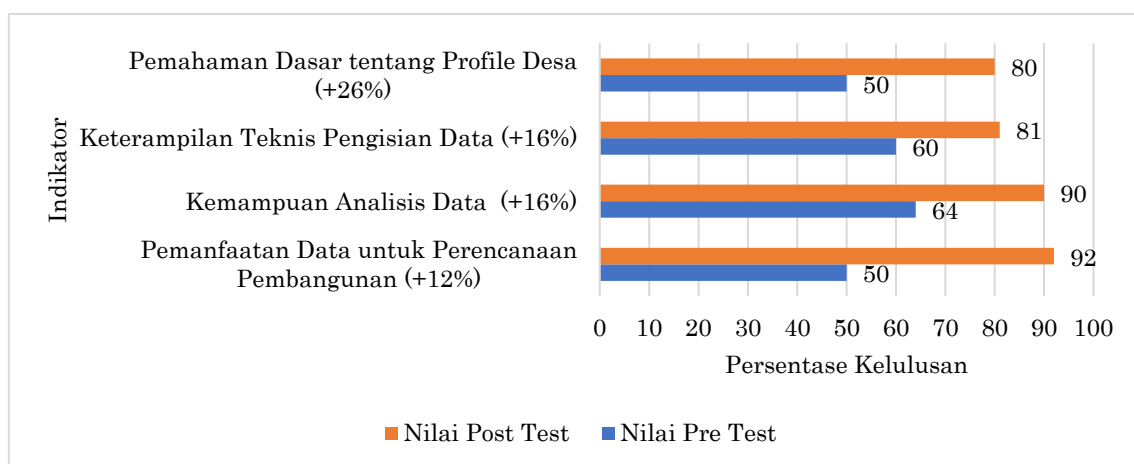
Kegiatan ini sekaligus membuka wawasan aparatur desa mengenai nilai strategis data dalam tata kelola pembangunan. Mereka mulai menyadari bahwa pemanfaatan data yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pembangunan. Dengan demikian, simulasi ini bukan hanya menjadi latihan teknis,

melainkan juga transformasi cara pandang aparatur desa terhadap pentingnya data dalam merancang kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mengukur efektivitas pelatihan pemanfaatan Profil Desa dan memastikan bahwa tujuan dari pelatihan tercapai. Evaluasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu pre-test dan post-test, serta survei kepuasan peserta yang bertujuan untuk menilai kualitas dan keberhasilan pelatihan secara keseluruhan. Pada pre-test, peserta diuji untuk mengukur pengetahuan dasar mereka tentang pentingnya data desa, mulai dari pemahaman mengenai fungsi Profil Desa, cara pengisian data, hingga pemanfaatannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih menganggap Profil Desa hanya sebagai kewajiban administratif, sehingga pemahamannya terkait fungsi strategis data masih terbatas. Setelah pelatihan, dilakukan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Post-test mencakup pertanyaan yang lebih mendalam, seperti kemampuan menganalisis data kependudukan, memetakan kebutuhan prioritas pembangunan, dan menggunakan Profil Desa sebagai dasar penyusunan program kerja. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam kemampuan peserta mengaitkan data dengan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, seperti terlihat pada Gambar 3.

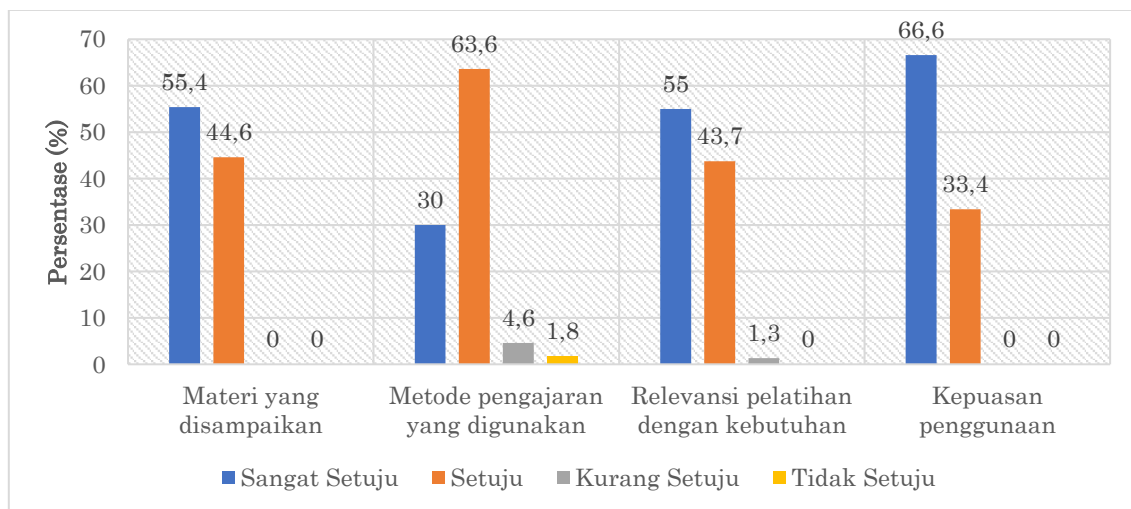


Gambar 3. Persentase Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Gambar 3 di atas menggambarkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan dalam pemanfaatan profile desa. Indikator *Pemahaman Dasar tentang Profil Desa* mengalami peningkatan tertinggi sebesar 26% (dari 50% menjadi 80%), menunjukkan perubahan

paradigma peserta terhadap pentingnya Profil Desa sebagai instrumen perencanaan. Keterampilan teknis pengisian data meningkat 16% (60% menjadi 81%), meskipun peningkatannya relatif lebih rendah dibanding indikator lain sehingga masih memerlukan pendampingan lanjutan. Pada aspek analisis data, peserta menunjukkan lompatan dari 64% menjadi 90% (+16%), menandakan bahwa mereka cukup cepat memahami cara mengolah data menjadi informasi strategis. Sementara itu, indikator *Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan* mencatat capaian akhir tertinggi, yaitu 92% (dari 50%, +12%), yang mengindikasikan bahwa peserta mampu mengaitkan hasil pelatihan dengan praktik nyata dalam penyusunan program pembangunan desa. Secara umum, hasil ini membuktikan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan kapasitas aparatur desa, baik dari sisi pemahaman konseptual, keterampilan teknis, hingga pemanfaatan data dalam perencanaan berbasis bukti.

Selain tes pemahaman, survei kepuasan peserta dilakukan untuk menilai kualitas pelatihan secara keseluruhan, meliputi aspek materi, metode pengajaran, serta relevansi pelatihan dengan kebutuhan aparatur desa. Survei ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana kegiatan pengabdian masyarakat mampu menjawab permasalahan mitra sekaligus memberikan dasar untuk perbaikan di masa depan, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Pelatihan

Gambar 4 di atas menunjukkan, bahwa pada indikator *materi yang disampaikan*, sebanyak 55,4% peserta menyatakan sangat setuju dan 44,6% setuju, tanpa ada responden yang menyatakan kurang setuju maupun tidak setuju, sehingga menunjukkan bahwa materi pelatihan dianggap relevan dan mudah dipahami. Pada aspek *metode pengajaran yang digunakan*, 63,6% peserta setuju dan 30% sangat setuju, meskipun masih terdapat 4,6% yang kurang setuju dan 1,8% tidak setuju, mengindikasikan perlunya variasi metode pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya, pada indikator

relevansi pelatihan dengan kebutuhan, mayoritas peserta menyatakan puas dengan 55% sangat setuju dan 43,7% setuju, hanya 1,3% yang kurang setuju, menandakan bahwa materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata aparatur desa. Terakhir, pada aspek *kepuasan penggunaan*, hasilnya sangat positif dengan 66,6% peserta sangat setuju dan 33,4% setuju, tanpa ada penilaian negatif. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa pelatihan berhasil menjawab kebutuhan mitra dan mendapat apresiasi tinggi, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam metode penyampaian agar lebih adaptif terhadap berbagai gaya belajar peserta.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui optimalisasi pengelolaan Profil Desa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek soft skill maupun hard skill aparatur desa, di mana pemahaman dasar mengenai Profil Desa meningkat sebesar 26%, keterampilan teknis pengisian data naik 16%, kemampuan analisis data bertambah 16%, serta pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan meningkat 12%. Peningkatan ini menandakan bahwa pelatihan berhasil mengubah paradigma aparatur desa dari sekadar melihat Profil Desa sebagai kewajiban administratif menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, survei kepuasan peserta memperlihatkan bahwa mayoritas menilai materi, metode, dan relevansi pelatihan sangat baik, dengan kepuasan penggunaan mencapai 66,6% responden menyatakan sangat setuju.

Ke depan, disarankan agar kegiatan pengabdian ini dilanjutkan dengan pendampingan berkelanjutan, baik melalui konsultasi daring maupun tatap muka, guna memperkuat konsistensi pengelolaan data desa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model digitalisasi Profil Desa berbasis teknologi informasi yang lebih adaptif, sehingga aparatur desa tidak hanya terampil dalam mengelola data, tetapi juga mampu mengintegrasikannya ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Weulun atas kerja sama dan partisipasinya selama pelaksanaan pelatihan ini. Ucapan terima kasih juga kepada Universitas Nusa Cendana yang telah mendukung penuh kegiatan ini, serta kepada seluruh instruktur yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam pelatihan. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti setiap sesi pelatihan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan sukses. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak

dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, J. S., Retnaningdiah, D., & Hayati, K. (2022). Optimalisasi Peran Dan Fungsi BUMDes Astaguna Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Trihanggo. *Japi (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 7(2), 155–162. <https://doi.org/10.33366/japi.v7i2.3684>
- Anita. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa: Studi Literatur Desa Janti Wates, Kabupaten Kediri. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1642–1650. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1369>
- Arianto, B., & Bakthiar, R. (2023). Effective Strategies for Preventing Bribery on Village Fund Management in Pandeglang Regency. *Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 83–103. <https://doi.org/10.25273/jap.v12i1.14487>
- Baunsele, A. B., Boelan, E. G., Tukan, G. D., Taek, M. M., Amaral, M. A. L., Missa, H., Sooi, A. G., Sinlae, A. A. J., Ratumakin, P. A. K. L., & Ketmoen, A. (2023). Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang-NTT. *Bakti Cendana*, 6(1), 37–48. <https://doi.org/10.32938/bc.6.1.2023.37-48>
- Faiz, I. A., Zamzami, F., Natasari, D., & Wulandari, R. (2021). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(2), 455. <https://doi.org/10.22146/jp2m.51199>
- Ghassani, S. A., Priyarsono, D. S., Rindayanti, W., & Seminar, A. U. (2022). Analisis Pembangunan Wilayah Melalui Program Dana Desa Di Kabupaten Bogor: Pendekatan Teori Kelembagaan. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 48. <https://doi.org/10.22146/mgi.75432>
- Haris, A., Budiyanto, B., & Suhermin, S. (2023). The Effect of Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice on Engagement and Village Apparatus Performance in Indonesia. *International Journal of Business and Management Review*, 11(10), 17–37. <https://doi.org/10.37745/bje.2013/vol11n101737>
- Hartati, D. A., Ambo, A. M. C., Ihsan, F., Zelila, Z., Alimudin, M., & Nursin, E. (2024). Penguatan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa. *Monsu Ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 85–97. <https://doi.org/10.32529/tano.v7i2.3392>
- Holivil, E., Pane, B., Narang, N. H. Z., Arpin, R. M., Kholikin, R. A., Radja, A. K., & Mushlih, M. A. H. (2025). Pelatihan Literasi Digital Dan Aplikasi Augmented Reality Untuk Pembelajaran Kreatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(2), 2082–2092.
- Machfiroh, I. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Muhiran, M. (2025). Peningkatan Kapasitas Hukum Dalam Pengelolaan Bumdes Untuk Mewujudkan Kadipaten Menjadi Desa Mandiri Di Kabupaten Wonosobo. *Khidmatuna Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 157–172. <https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v5i2.3482>
- Mulyana, Y. (2025). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Pameuntasan. *Jipm*, 1(2), 48–53. <https://doi.org/10.63288/jipm.v1i2.7>
- Nofiarsyah, N. (2019). Pemetaan Sumberdaya Aparatur Desa Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.46>

- Putri, B. N. R. G., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. (2024). Optimalisasi Alokasi Dana Desa: Pengaruh Akuntabilitas Dan Kinerja Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 597–604. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.105>
- Rahman, A. (2023). Sinergi Antara Aparatur Desa Dengan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)*, 2(1). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i1.3605>
- Rahmat, D., & Hermana, D. (2020). Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, 12(2), 13–17. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v12i2.3>
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024. *Jadment*, 1(2), 89–102. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Teknologi Informasi (E-Government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174>
- Sari, G. K. (2024). Peran PBB Melalui MDGs Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *JMRD*, 1(2), 102–107. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i2.727>
- Sari, I. F., Hidayati, D. A., Ratnasari, Y., & Habibah, S. M. (2022). Pendampingan Pemetaan Potensi Desa Dono Arum Berbasis Asset Based Community Development Guna Mewujudkan Desa Wisata Yang Berkarakter Dan Smart Village. *Jurnal Abdi Insani*, 9(4), 1276–1286. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i4.731>
- Setiawan, M. A., Hartoyo, H., Seminar, K. B., Sartono, B., & Fitriati, R. (2024). Tata Kelola Digital Layanan Lalu Lintas Jalan Tol Di Indonesia: Studi Aplikasi Travoy Jasa Marga. *Matra Pembaruan*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.21787/mp.8.1.2024.1-16>
- Tampubolon, K. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Pertanian Berbasis Komunitas Melalui Inovasi Teknologi Agroteknologi Dan Reformasi Birokrasi Desa. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(2), 25–37. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.1026>
- Yarni, M., Prasna, A. D., Irwandi, I., Bustanuddin, B., & Erwin, E. (2024). Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3631–3642. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1526>
- Yatminiwati, M., Marsuhin, M., & Ermawati, E. (2023). HR Capability of Village Government Devices in Improving Public Services. *Wiga Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(1), 10–16. <https://doi.org/10.30741/wiga.v13i1.959>
- Yunianingrum, Y., & Kolopaking, L. M. (2018). Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm]*, 2(4), 495–508. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.4.495-508>